



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2012 - 2017**



**DINAS KOMUNIKAS, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BULELENG**

**2017**







**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR: 900/84/KOMINFOSANDI/2017

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
PERSANDIAN  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2012-2017**

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Buleleng periode 2012-2017, maka untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, yang dapat diimplementasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng;

b. Bahwa sesuai Pasal 150 ayat (3) poin e, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik government;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULELENG TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2012-2017

### **Pasal 1**

Rencana startegis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017 adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan , strategi, program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2012- 2017.

### **Pasal 2**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULELENG
- BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VII : PENUTUP

Pasal 3

Rincian lebih lanjut Rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) tercantum dalam lampiran keputusan ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Pasal 5

Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya


Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada tanggal : 14 Februari 2017

Kepala

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  
Kabupaten Buleleng



**Dr. Drs. Ketut Suweca, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620608 198203 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Arsip



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnyalah, Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Rencana Strategis merupakan proses rumusan rencana secara sistematis yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan pengetahuan, antisipatif serta mengorganisasikan sebagai usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis pula. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng disusun dalam periode waktu tahun 2012 sampai dengan 2017 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Buleleng.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng substansinya memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Renstra ini akan menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penyusunan LAKIP serta program dan kegiatan lainnya yang terkait.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini. Dan semoga renstra ini dapat bermanfaat untuk pengembangan dan kemajuan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Buleleng.

Singaraja, Februari 2017

Penyusun

# DAFTAR ISI

	Halaman
SK Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>Bab I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Batasan Pengertian .....	2
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.4. Maksud dan Tujuan .....	3
1.5. Sistematika Penulisan .....	4
<b>Bab II    GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI,              INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULELENG .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	7
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng .....	9
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng .....	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	18
<b>Bab III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN              FUNGSI .....</b>	<b>20</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng ....	20
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	22
3.3. Analisis SWOT .....	23
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis .....	25



<b>Bab IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>29</b>
4.1.	Visi dan Misi .....	29
4.2.	Tujuan dan Sasaran .....	29
4.3.	Strategi dan Kebijakan .....	32
<b>Bab V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>37</b>
5.1.	Pengantar .....	37
5.2.	Rencana Program dan Kegiatan SKPD .....	38
<b>Bab VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>44</b>
6.1.	Pengantar .....	44
6.2.	Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	44
<b>Bab VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
7.1.	Kesimpulan.....	46
7.2.	Saran .....	46

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1: Klasifikasi PNS Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng berdasarkan status kepegawaiannya, bulan Januari 2017 .....	9
Tabel 2.2: Klasifikasi PNS Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng berdasarkan golongan kepegawaiannya, bulan Januari 2017 .....	10
Tabel 2.3: Klasifikasi PNS Dinas Kominfo Kab. Buleleng berdasarkan pendidikan terakhirnya, bulan Januari 2017 .....	10
Tabel 2.4: Klasifikasi PNS Dinas Kominfo Kab. Buleleng berdasarkan bidang pendidikan terakhirnya, bulan Januari 2017 .....	10
Tabel 2.5: Sumber daya sarana prasarana/ aset yang dimiliki Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng .....	11
Tabel 2.6: Perkembangan kinerja keuangan Dinas Kominfo Kab. Buleleng tahun 2008-2012 .....	13
Tabel 2.7: Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo Kab. Buleleng, pendanaan bersumber dari APBN Pusat pada tahun 2008-2012 .....	14
Tabel 2.8: Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng .....	16
Tabel 2.9: Anggaran dan realisasi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng .....	17
Tabel 4.1: Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng .....	31
Tabel 4.2: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng .....	35
Tabel 5.1: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng .....	39
Tabel 6.1: Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	45



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng .....	8

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan bidang komunikasi, informatika dan persandian yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional perlu dilakukan secara terencana dan terpadu agar dapat dilakukan secara optimal, efektif, efisien serta tepat sasaran.

Sesuai dengan komitmen nasional arah pembangunan komunikasi dan informatika mensinergikan entitas sumber daya pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal, terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam kiprah pembangunan, yang kesemuanya itu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Guna menjamin berlangsungnya pembangunan bidang komunikasi, informatika dan persandian yang efisien, efektif dan tepat sasaran serta memperhatikan arahan tersebut diatas diperlukan instrumen pertanggung jawaban dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, sebagai langkah awal untuk mengukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan pembangunan selama periode waktu yang telah ditetapkan dan hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Rencana Strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan (strategis) regional dan nasional serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dengan demikian Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan dihadapi dimasa mendatang yang terkait pula dengan penerapan sistem pertanggung jawaban pemerintah yang tepat, jelas dan legitimate.



## **1.2. Batasan Pengertian**

Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan rencana pembangunan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat visi dan misi kepala daerah, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang mendukung visi dan misi kepala daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD berpedoman kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Tahunan atau Renja SKPD. Program, kegiatan yang tertuang didalamnya dibiayai dari sumber anggaran APBD I tetapi juga dibiayai dari APBD II.

Dalam pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng digunakan tata cara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.3. Landasan Hukum**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng merupakan bagian kerangka/pola Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, oleh karenanya peraturan perundangan yang dijadikan acuan penyusunannya adalah :

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah;

5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sisteim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017;

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan persandian yang berkelanjutan (*Sustainability Development*) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun.
2. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinrtah (LAKIP) SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng berdasarkan kewenangan sesuai dengan Tupoksinya.



3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan persandian.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

1. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidangnya secara baik, terencana dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Tersedianya dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2012-2017, serta dasar/acuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai landasan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng pada setiap akhir Tahun Anggaran.
3. Menjadikan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga diharapkan dapat beroperasi secara lebih efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.
4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng disusun dengan pokok bahasan sebagai berikut :

#### **Bab I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Batasan Pengertian, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.

- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULELENG
- Pada bab ini diuraikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran pelayanan serta menguraikan tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, capaian kinerja serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.
- Bab III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- Pada bab ini memuat identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan rencana strategis kabupaten buleleng dan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta isu-isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dalam bidang kebersihan dan pertamanan dan analisis SWOT untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- Pada bab ini diuraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
- Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- Pada bab ini diuraikan tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagai instrumen untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, yang berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif setiap kegiatan.



Bab VI : INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan uraian dari Bab I sampai dengan Bab VI, dan saran-saran yang disampaikan demi pembangunan yang lebih baik.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULELENG**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, dengan struktur organisasinya terdiri atas Sekretariat, dan lima bidang, yaitu: Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Bidang Layanan E-Government, dan Bidang Persandian.

##### **2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam Peraturan Bupati No. 75 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang harus dipedomani dan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

###### **a. Tugas pokok**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian.

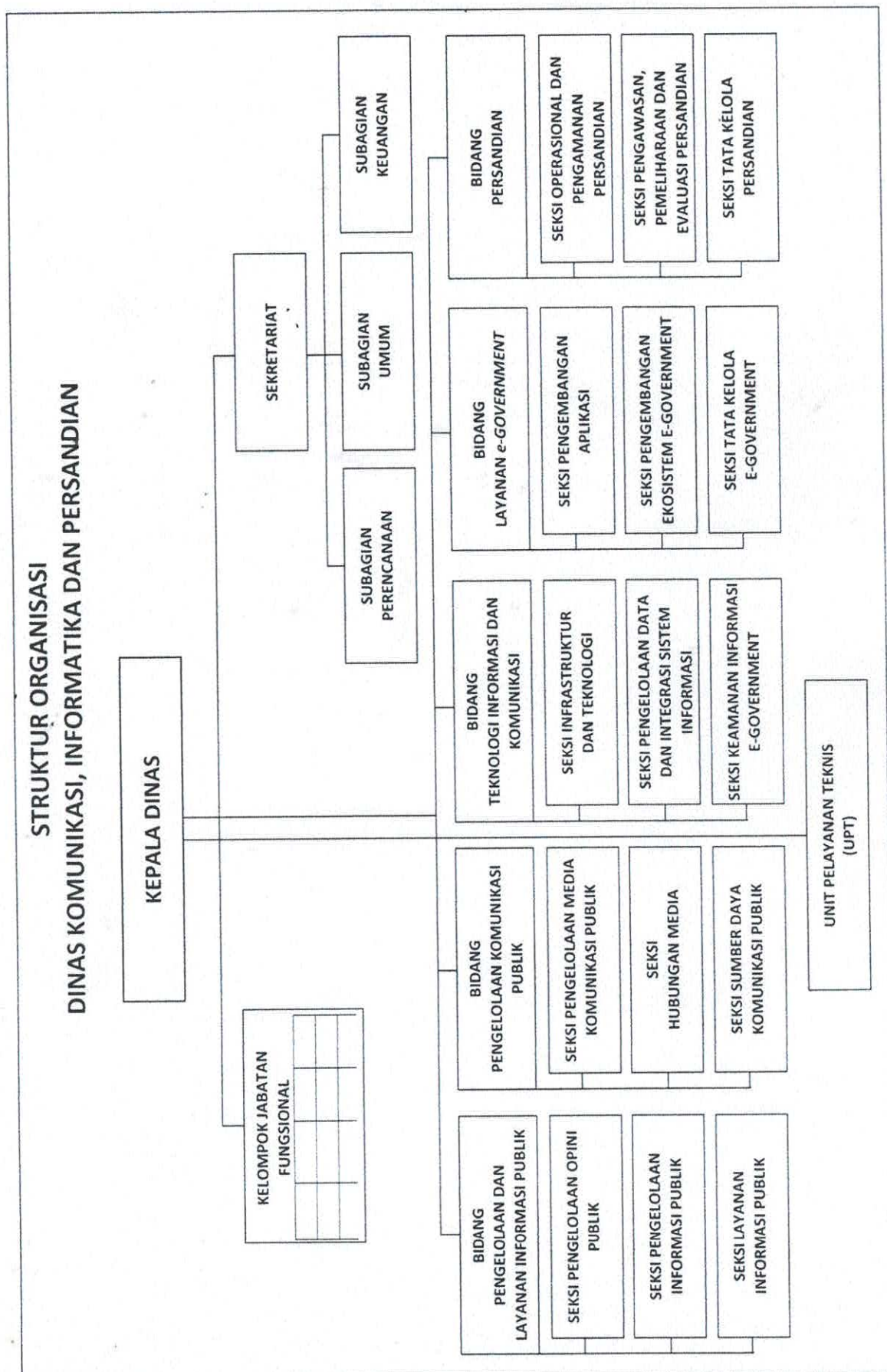
###### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;



c. Struktur organisasi



Gambar 1.  
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng

Dilihat dari struktur jabatan di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng terdiri atas 1 jabatan Eselon II.b yaitu Kepala Dinas, 1 jabatan Eselon III.a yaitu Sekretaris, 5 jabatan Eselon III.b yaitu Kepala Bidang, dan 18 jabatan Eselon IV.a yaitu Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sesuai dengan data pada bulan Nopember 2013, sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng sebanyak 83 orang, yang terdiri atas: 43 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang tenaga harian, 1 orang tenaga harian lepas, dan 38 orang tenaga kontrak, seperti terlihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 : Klasifikasi PNS Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng berdasarkan status kepegawaian, bulan Januari 2017

<b>No.</b>	<b>Status Kepegawaian</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	46	
2.	Tenaga harian	1	
3.	Tenaga harian lepas	1	
4.	Tenaga kontrak	54	
<b>Jumlah</b>		<b>102</b>	

Dari jumlah PNS yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, jika dilihat dari tingkat Golongannya, maka jumlah PNS golongan I sebanyak 0 orang, Golongan II sebanyak 12 orang, Golongan III sebanyak 24 orang, dan Golongan IV sebanyak 7 orang. Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikannya, maka jumlah PNS yang memiliki pendidikan SD sebanyak 0 orang, berpendidikan SMP/ SLTP sebanyak 0 orang, berpendidikan SMA/ SLTA sebanyak 21 orang, berpendidikan Diploma sebanyak 4 orang, berpendidikan Sarjana sebanyak 14 orang, dan berpendidikan Paska Sarjana sebanyak 4 orang. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.2 : Klasifikasi PNS Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng berdasarkan golongan kepegawaiannya, bulan Januari 2017

No.	Golongan Kepegawaian	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Golongan I	0	
2.	Golongan II	8	
3.	Golongan III	28	
4.	Golongan IV	7	
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	

Tabel 2.3 : Klasifikasi PNS Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng berdasarkan pendidikan terakhirnya, bulan Januari 2017

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	SD	0	
2.	SMP/ SLTP	0	
3.	SMA/ SLTA	13	
4.	Diploma	2	
5.	Perguruan Tinggi (S1)	25	Sarjana
6.	Perguruan Tinggi (S2)	2	Paska sarjana
7.	Perguruan Tinggi (S3)	1	Doktor
<b>Jumlah</b>		<b>83</b>	

Dari jumlah PNS yang memiliki tingkat pendidikan di atas SMA/SLTA tersebut, hanya sedikit yang memiliki pendidikan teknis di bidang komunikasi dan informatika. Seperti dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4 : Klasifikasi PNS Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng berdasarkan bidang pendidikan terakhirnya, bulan Januari 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Bidang Pendidikan		
		Komunikasi	Informatika	Umum/ lain-lain
1.	SMA/ SLTA			13 orang
2.	Diploma		2 orang	
3.	Perguruan Tinggi (S1)		5 orang	20 orang
4.	Perguruan Tinggi (S2)			2 orang
4.	Perguruan Tinggi (S3)			1 orang
<b>Jumlah keseluruhan PNS: 43 orang</b>				



Selain dari jenjang pendidikan formal tersebut, terdapat 2 orang PNS yang memiliki sertifikat GCEO dari BPPTIK, 3 orang PNS yang memiliki sertifikasi keahlian persandian, dan berbagai pelatihan TIK lainnya.

### 2.2.2. Sumber Daya Sarana Prasarana/ Aset

Sarana prasarana ataupun aset yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, sebagian merupakan aset peninggalan masa Departemen Penerangan yang sudah dalam keadaan rusak, namun sebagian besar lagi merupakan pengadaan baru. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 : Sumber daya sarana prasarana/ aset yang dimiliki Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng .

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda Empat	2 Buah	
2	Kendaraan Roda Dua	23 Buah	
3	Komputer	93 Unit	
4	Printer	33 Buah	
5	Meja Komputer	17 Buah	
7	Meja Kerja	70 Buah	
8	Kursi Kerja	82 Buah	
9	Kursi Tamu	2 Set	
10	Filling kabinet	11 Buah	
11	Tabung Pemadam	2 Buah	
12	Rak Kartu Kendali	1 Buah	
13	White Board	4 Buah	
14	TV	1 Buah	
15	Kulkas	1 Buah	
16	Telepon	2 Buah	
17	Fax	1 Buah	
18	AC	9 Unit	
19	Layar OHP	1 Buah	
20	Camcoder	1 Buah	
21	Camera Digital	9 Buah	
22	Caset Recorder	3 Buah	
23	Handycam	1 Buah	
24	Mesin Ketik	1 Buah	
25	DVD Player	2 Buah	
26	LCD Proyektor	4 Buah	
27	Power Amplifier	1 Buah	
28	Power	3 Buah	
29	Mixer	2 Buah	
30	Microphone	8 Buah	
31	Equalizer	1 Buah	
32	Microphone Wireless	2 Unit	

33	Stand Microphone Fortable	6 Buah	
34	Stand Microphone	4 Buah	
35	Horn Speaker (Corong)	4 Buah	
36	Stand Horn Speaker	2 Buah	
37	Speaker	8 Buah	
38	Stand Speaker	2 Buah	
39	Tone Control	1 Buah	
40	Amplifier Wireless	1 Buah	
41	Kabel Speaker	5 Rol	
42	Korden	300 Mtr	
43	Loudspeker	5 Buah	
44	Antena Parabola	2 Buah	
45	Reciver Matrik Bola	1 Buah	
46	Hand Metal Detektor	3 Buah	
47	Rak Kayu	1 Buah	
48	Alat Komunikasi radio SSB		
49	Radio Komunikasi UHF	1 paket	
50	Hand Metal Detektor	5 Buah	
51	Handy Talky	8 Buah	
52	Radio Station repiter	1 Paket	
53	Radio Station repiter	1 Paket	
54	Handy Talky	24 Buah	
55	Loudspeaker	1Buah	
56	Loudspeaker( softbufer )	1Buah	
57	Antena Duplexer	2 Buah	
58	Handy Talky	3 Buah	
59	Faxsimile	9 Buah	
60	Alat Komunikasi radio SSB	1 Paket	
61	Alat Komunikasi radio/Reg	5 Buah	
62	Lemari Kayu/ Loker	2 Buah	
63	Kursi kerja	1 Buah	
64	Kursi kerja	2 Buah	
65	Kursi kerja	9 Buah	
66	Kursi kerja panjang	1 Buah	
67	Ac Split 1 PK	2 Buah	
68	Alat komunikasi/radio Reg	5 Buah	
69	Komputer PC	1 Buah	
70	Komputer PC	2 Buah	
71	Printer	2 Buah	
72	Peralatan jaringan IP-CAM	1 Paket	
73	Meja Kerja/Meja Internet	3 Buah	
74	Meja Kerja/Meja Counter	1 Buah	
75	Meja kerja	2 Buah	
76	Meja kerja	1 Buah	
77	Handy Talky	25 Buah	
78	Ipad	2 Buah	
79	TV LED	1 Buah	
80	Ipad	2 Buah	
81	TV LED	1 BUAH	
82	Komputer PC	1 UNIT	



83	Handphone	1 unit	
84	TV LED	1 BUAH	
85	Router	1 Unit	
86	Jaringan Internet	1 Paket	
46	Hand Metal Detektor	3 Buah	
47	Rak Kayu	1 Buah	
48	Alat Komunikasi radio SSB		
49	Radio Komunikasi UHF	1 paket	
50	Hand Metal Detektor	5 Buah	
51	Handy Talky	8 Buah	
52	Radio Station repiter	1 Paket	
53	Radio Station repiter	1 Paket	
54	Handy Talky	24 Buah	
55	Loudspeaker	1Buah	
56	Loudspeaker( softbufer )	1Buah	
57	Antena Duplexer	2 Buah	
58	Handy Talky	3 Buah	

## 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng

### 2.3.1. Kinerja Pelayanan Keuangan

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, dilihat dari segi keuangannya, pada kurun waktu tahun 2008 – 2012 terus mengalami peningkatan pagu anggaran, walaupun tidak terlalu signifikan peningkatannya, seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut. Hal ini disebabkan karena pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika belum menjadi prioritas utama pembangunan, namun telah menjadi perhatian. Hal ini terwujud dengan diubahnya status lembaga dari kantor menjadi dinas, sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2008, tanggal 18 Pebruari 2008.

Tabel 2.6 : Perkembangan kinerja keuangan Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng tahun 2008-2012

Tahun	Pendapatan	Belanja Langsung	Surplus (Defisit)
2008	-	Rp. 1.872.275.000,-	(Rp. 1.846.130.000,-)
2009	-	Rp. 2.210.040.000,-	(Rp. 2.210.040.000,-)
2010	-	Rp. 2.000.000.000,-	(Rp. 2.000.000.000,-)
2011	-	Rp. 1.595.000.000,-	(Rp. 1.595.000.000,-)
2012	-	Rp. 1.972.105.000,-	(Rp. 1.972.105.000,-)

Pendanaan kegiatan-kegiatan rutin pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, sepenuhnya masih bersumber pada APBD II Kabupaten Buleleng, belum ada yang bersumber pada APBD I Propinsi Bali, maupun APBN Pusat. Dalam kurun waktu tahun 2008 – 2012, terdapat beberapa



kali kegiatan yang pendanaannya dari pusat, tetapi belum menjadi kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan, seperti terlihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7 : Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng , pendanaan bersumber dari APBN Pusat pada tahun 2008-2012

No.	Uraian Kegiatan	Jenis Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	Besar Anggaran	Keterangan
1.	Media center	Bantuan	2008	-	Berupa 4 unit Komputer PC, dan kelengkapan jaringan
2.	Mobil unit	Bantuan	2009	-	Berupa mobil unit beserta kelengkapannya

Pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut bersifat insidental, tidak ada keberlanjutannya di tahun selanjutnya.

### 2.3.2. Kinerja Pelayanan Kegiatan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang komunikasi dan informatika. Ada dua jenis kegiatan yang dilaksanakan, yaitu: kegiatan rutin dinas yang ditangani oleh sekretariat dinas, dan kegiatan pokok dinas yang ditangani oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dari kegiatan pokok yang dilaksanakan tersebut, ada yang bersifat pelayanan intern Pemkab Buleleng, dan ada yang bersifat pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan yang bersifat intern Pemkab Buleleng, antara lain: pembangunan dan perawatan jaringan online Pemkab Buleleng yang menghubungkan seluruh instansi pemerintah dalam satu jaringan, penyediaan bandwidth internet untuk instansi pemerintah yang terhubung dalam jaringan online, pembuatan subdomain instansi pemerintah pada situs resmi Pemkab Buleleng ([www.bulelengkab.go.id](http://www.bulelengkab.go.id)), pembinaan dan pengawasan pemanfaatan piranti lunak di instansi pemerintah, pelatihan sumberdaya aparatur negara lingkup Pemkab Buleleng di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pelayanan pengadaan secara elektronik (LPSE), pengumpulan dan pengolahan data-data pembangunan pada masing-masing SKPD untuk kemudian disebarluaskan ke masyarakat, pelayanan sound sytem untuk acara-acara yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, serta peliputan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat, antara lain: penyebarluasan informasi dari pemerintah kepada masyarakat melalui situs resmi Pemkab Buleleng, pertunjukan rakyat yang diselenggarakan di desa/ kelurahan, ceramah, dialog, sarasehan, anjangsana, siaran keliling, majalah Singa Manggala dan melalui Pameran pembangunan yang diselenggarakan untuk ikut memeriahkan HUT Proklamasi 17 Agustus; penyediaan akses internet gratis untuk masyarakat, serta pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Lebih lengkapnya, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel 2.8. sedangkan untuk penganggarannya sesuai dengan rencana dan realisasi pendanaannya dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.8  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Buleleng

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5
1	Terbangun dan terbinanya jaringan komunikasi dan informasi (online sistem)	-	-	-	15 instansi	30 titik	35 titik	12 bulan	35 titik	15 instansi	30 titik	35 titik	12 bulan	35 titik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terbangun dan berkembangnya sistem informasi pemerintah daerah	-	-	-	-	-	1 sistem	1 sistem	1 sistem	-	-	1 sistem	1 sistem	1 sistem	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
3	Terbinanya SKPD dalam pemanfaatan piranti lunak	-	-	-	-	43 instansi	43 instansi	20 sekolah	12 bulan	-	43 instansi	43 instansi	20 sekolah	12 bulan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedia bandwidth internet pada jaringan online	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	11 bulan	12 bulan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Optimalnya pengelolaan subdomain SKPD pada situs resmi Pemkab Buleleng	360 hari	-	-	-	10 instansi	16 instansi	9 instansi	12 instansi	-	10 instansi	16 instansi	9 instansi	12 instansi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya layanan akses internet gratis bagi masyarakat	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
7	Terbangunnya aplikasi pada jaringan online	-	-	-	-	-	2 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	-	-	2 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
8	Terinventarisirnya database pembangunan dan potensi daerah	-	-	-	-	24 SKPD/ 9 kec.	30 SKPD/ 9 kec.	SKPD/Kec	SKPD/Kec.	-	24 SKPD/ 9 kec.	30 SKPD/ 9 kec.	SKPD/Kec.	SKPD/Kec.	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Terlathinya sumberdaya aparatur di bidang TIK	-	-	-	-	20 orang	20 orang	25 orang	25 orang	-	20 orang	20 orang	25 orang	25 orang	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur Dinas Kominfo	-	-	-	-	1 kali	-	1 kali	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	1 kali	-	100%	-	-	1 kali	-	100%	-	-	1 kali
11	Tersebarluaskannya informasi pembangunan melalui majalah dan pameran pembangunan	12 kali	-	-	2000 oplah/ 14 hari	3600 oplah/ 14 hari	2400 oplah/ 14 hari	650 oplah/ 14 hari	650 oplah/ 14 hari	2000 eks/ 14 hari	3600 oplah/ 14 hari	2400 oplah/ 14 hari	650 oplah/ 14 hari	650 oplah/ 14 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tersebarluaskannya informasi melalui pelayanan sound system dan siaran kelling	-	-	-	160 kali/ 20 kelompok	90 kali/ 45 kelompok	89 kali/ 45 kelompok	35 kali/ 25 kali	60 kali/ 40 kali	160 kali/ 20 kelompok	158 kali/ 46 kelompok	152 kali/ 46 kelompok	138 kali/ 26 kali	94 kali/ 40 kali	100%	138,89%	136,49%	249,14%	128,33%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tersebarluaskannya informasi yang bersifat penyuluhan melalui media tradisional	12 kali	-	-	3198 orang	1200 orang	2400 orang	10 kali	8 kali	3198 orang	1320 orang	1320 orang	10 kali	8 kali	-	100%	110%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Tersebarluaskannya informasi pembangunan melalui media elektronik (radio) dan website	12 kali	-	-	34 kali/ 192 berita	240 kali	240 kali	200 kali	250 kali	34 kali/ 237 berita	240 kali	285 kali	318 kali	250 kali	111,50%	100%	118,75%	158%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Terbentuk dan terbinanya kelompok informasi masyarakat	50% x Jumlah Kecamatan	-	-	10 kali	10 kali	10 kali	7 lokasi	5 lokasi	10 kali	10 kali	10 kali	7 lokasi	5 lokasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Terlaksananya dialog antara pemerintah dan masyarakat	12 kali	-	-	-	17 kali	16 kali	3 kali	5 kali	-	17 kali	16 kali	3 kali	5 kali	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 2.9  
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun ke-							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	Terbangun dan terbiayanya jaringan komunikasi dan informasi (online sistem)	363.896.000	381.956.000	242.500.000	99.805.000	194.535.000	361.048.000	373.817.200	236.122.200	99.793.000	189.770.100	98,22%	97,87%	97,37%	99,99%	97,55%	-36,76%						-36,02%
2	Terbangun dan berkembangnya sistem informasi pemerintahan daerah	-	-	163.680.000	182.875.000	71.475.000	-	-	163.430.000	182.599.300	71.100.750	0,00%	0,00%	99,85%	99,85%	99,48%	-11,34%						-11,58%
3	Terbiayanya SKPD dalam pemanfaatan piranti lunak	-	32.359.000	15.500.000	11.500.000	59.250.000	-	31.969.000	15.500.000	11.425.100	59.204.000	0,00%	98,79%	100,00%	99,35%	99,92%	9,26%						9,70%
4	Tersedia bandwidth internet pada jaringan online	-	349.925.000	317.840.000	168.230.000	187.015.000	-	346.805.700	310.886.300	168.119.650	186.257.300	0,00%	99,11%	97,81%	99,93%	99,59%	2,75%						3,32%
5	Optimalnya pengelolaan subdomain SKPD pada situs resmi Pemkab Buleleng																						
6	Tersedianya layanan akses internet gratis bagi masyarakat																						
7	Terbangunnya aplikasi pada jaringan online	-	-	100.000.000	25.300.000	119.100.000	-	-	98.850.000	25.243.795	118.664.300	0,00%	0,00%	98,85%	99,78%	99,63%	-29,12%						-28,21%
8	Terinventarisirnya database pembangunan dan potensi daerah	-	61.410.000	34.800.000	26.000.000	46.375.000	-	56.917.350	33.300.000	25.883.480	46.271.650	0,00%	92,68%	95,69%	99,55%	99,78%	8,41%						11,12%
9	Terlathinya sumberdaya aparatur di bidang TIK	-	42.787.500	34.415.000	26.890.000	44.375.000	-	16.702.500	34.414.000	26.812.650	44.313.200	0,00%	39,04%	100,00%	99,71%	99,86%	21,77%						40,65%
10	Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur Dinas Kominfo	-	77.602.500	-	28.050.000	30.000.000	-	77.552.500	-	28.050.000	29.835.300	0,00%	99,94%	0,00%	100,00%	99,45%	51,63%						51,50%
11	Tersebarluaskannya informasi pembangunan melalui majalah dan pameran pembangunan	423.257.500	328.500.000	297.265.000	216.050.000	224.200.000	418.833.500	326.512.000	297.175.000	215.925.295	220.937.560	98,95%	99,39%	99,97%	99,94%	98,54%	-18,33%						-18,36%
12	Tersebarluaskannya informasi melalui pelayanan sound system dan siaran keliling	44.385.000	130.000.000	106.000.000	85.809.000	82.500.000	41.515.000	128.910.000	105.669.000	85.803.400	76.037.450	93,53%	99,16%	99,69%	99,99%	92,17%	3,92%						2,45%
13	Tersebarluaskannya informasi yang bersifat penyuluhan melalui media tradisional	-	210.955.000	167.397.000	87.465.000	78.700.000	-	202.672.400	165.037.884	87.304.953	77.538.068	0,00%	96,07%	98,59%	99,82%	98,52%	-7,14%						-6,11%
14	Tersebarluaskannya informasi pembangunan melalui media elektronik (radio) dan website	-	59.200.000	64.000.000	67.614.700	71.700.000	-	53.787.300	59.049.000	66.914.700	69.392.565	0,00%	90,86%	92,26%	98,96%	96,78%	29,64%						31,06%
15	Terbentuk dan terbiayanya kelompok informasi masyarakat	18.200.000	42.000.000	63.000.000	41.000.000	42.200.000	18.200.000	41.750.000	63.000.000	41.000.000	41.579.300	100,00%	99,40%	100,00%	100,00%	98,53%	9,80%						9,47%
16	Terlaksananya dialog antara pemerintah dan masyarakat	-	75.000.000	58.000.000	36.950.000	41.200.000	-	68.162.350	57.876.000	36.838.100	40.291.430	0,00%	90,88%	99,79%	99,70%	97,79%	6,01%						8,42%

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **2.4.1. Tantangan**

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng yang luasnya mencapai 24,25% luas Provinsi Bali (1.365,88 Km<sup>2</sup>), sangat kompleks, hal ini dikarenakan wilayahnya membentang dari Timur sampai ke Barat pulau Bali dan berada di sisi Utara pulau Bali, memiliki wilayah yang berbentuk pesisir, dataran, hingga perbukitan. Hal ini tentu menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan di Kabupaten Buleleng. Kondisi geografis yang seperti ini menjadi salah satu sebab adanya daerah-daerah blank spot di Kabupaten Buleleng, seperti: Kecamatan Tejakula. Hal ini tentu saja menyebabkan sulitnya masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan informasi, dengan demikian maka penyebarluasan informasi di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng belum dapat merata.

Selain tantangan geografis, maka sering terjadinya perubahan peraturan/pedoman penyelenggaraan komunikasi dan informatika terutama eksistensi lembaga yang membidangi komunikasi dan informatika menjadi menyulitkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng dalam melakukan konsultasi dan koordinasi pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Masih rendahnya tingkat pemahaman akan pentingnya media informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah menyebabkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan informasi yang disebarluaskan ke masyarakat belum maksimal. Selain itu juga perhatian masyarakat akan sebaran informasi yang telah diberikan belum mampu diserap dan oleh masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan.

Sumber daya aparatur negara di bidang teknologi informasi dan komunikasi pun masih terasa kurang, sehingga ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam usaha mempercepat proses pembangunan di bidang informasi dan komunikasi.

### **2.4.2. Peluang**

Selain daripada tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, terdapat juga peluang-peluang yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi



yang telah ditetapkan, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Salah satu peluang yang dapat diambil adalah jumlah penduduk Kabupaten Buleleng yang mencapai 662.920 jiwa (sumber Buleleng Dalam Angka 2012), ini tentu saja merupakan potensi perlu dikelola dengan baik, sehingga cita-cita menjadikan masyarakat Buleleng sebagai masyarakat yang informatif dapat tercapai.

Dukungan pemerintah dengan dibentuknya berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur pembangunan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih, cukup memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*).

Dalam usaha penyebarluasan informasi ke masyarakat, banyaknya media massa baik cetak maupun elektronik (radio) yang ada di kabupaten Buleleng memberikan dukungan yang signifikan, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan informasi pembangunan. Selain itu, masih tingginya minat masyarakat untuk menyaksikan kesenian tradisional membuat penyebarluasan informasi melalui media tradisional menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan informasi.

Terbentuknya sejumlah kelompok informasi masyarakat di hampir setiap kecamatan, menjadi sumber daya komunikasi yang harus terus dikembangkan dan diberdayakan, sehingga masyarakat khususnya anggota kelompok tersebut dapat menjadi masyarakat yang informatif dan dapat memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan.



### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahandi bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian, sesuai dengan Perda No. 18 Tahun 2016, melaksanakan fungsi-fungsi yang menunjang terlaksananya tugas pokok tersebut. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

SDM menjadi salah satu faktor penting terlaksananya sebuah perencanaan. Seberapa baik dan sempurnanya sebuah perencanaan pembangunan, namun jika tidak dukung oleh SDM yang handal dan memiliki kompetensi yang baik, maka apa yang telah direncanakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan capai target kinerjanya. Seperti pada bab sebelumnya, pada tabel 2.4 dapat dilihat kondisi PNS di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng berdasarkan jenis pendidikan terakhirnya. Di sana tampak bahwa jumlah PNS yang memiliki pendidikan di bidang komunikasi, baik diploma maupun sarjana berjumlah 2 orang, di bidang informatika, baik diploma maupun sarjana berjumlah 7 orang, sedangkan di bidang lainnya (seperti ekonomi, hukum, dll) baik diploma, sarjana, maupun paska sarjana berjumlah 13 orang. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian, dimana dibutuhkan PNS yang memiliki keahlian di bidang komunikasi dan di bidang informatika, baik itu yang berjenjang pendidikan diploma, maupun sarjana.

#### **2. Master Plan pembangunan e-gov**

Untuk dapat membangun pemerintahan yang berbasis elektronika, atau lebih dikenal dengan istilah *e-government*, maka sangat dibutuhkan sebuah perencanaan besar (*master plan*) yang meliputi seluruh aspek pembangunan *e-gov*, seperti infrastruktur jaringan, aplikasi sistem informasi yang akan dibutuhkan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Tanpa adanya master plan ini akan menyebabkan arah pembangunan *e-gov* akan tidak menentu, hanya sesuai dengan

kemampuan baik dan finansial maupun SDM, dan perencanaan insidental. Pembuatan master plan ini pun perlu dilakukan oleh instansi pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang ini dan telah terbukti kemampuannya di daerah-daerah lain, seperti BPPT.

Master plan inilah yang nantinya akan menjadi pedoman seluruh SKPD dalam melakukan perencanaan dan pembangunan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkaitan/ bersangkutan dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga arah kebijakan pembangunan *e-government* Pemkab Buleleng akan menjadi jelas, terarah, dan berkelanjutan.

Beberapa persoalan yang muncul sebagai turunan dari belum adanya master plan pembangunan *e-government* di pemerintah Kabupaten Buleleng, yaitu:

- a. Terbangunnya jaringan-jaringan komputer yang dibuat oleh SKPD di luar Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Buleleng di Kabupaten Buleleng.

Sesungguhnya dalam satu Pemkab hanya dibutuhkan 1 (satu) jaringan online yang kemudian dapat digunakan oleh seluruh SKPD yang memiliki aplikasi sistem informasi, sedangkan yang terjadi sekarang, ada setidaknya 3 jaringan online yang dibangun oleh SKPD yang memiliki aplikasi sistem informasi, baik yang pendanaannya dari APBN maupun APBD II, diluar Jaringan Online Pemkab Buleleng yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng, seperti: Jaringan Pendidikan (jardiknas) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, Jaringan SIPKD yang dikelola oleh Bagian Keuangan Setda Buleleng, dan Jaringan SIAK yang dikelola oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Hal ini tentu saja merupakan inefisiensi anggaran, karena jika memanfaatkan 1 jaringan saja, maka biaya pembangunan dan perawatan jaringan yang lainnya dapat digunakan untuk pembangunan pada sektor lainnya.

- b. Pembangunan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sporadis

Belum adanya master plan yang menjadi pedoman dan pegangan dalam pembangunan di bidang TIK menyebabkan instansi-instansi yang membutuhkan, membangun sendiri tanpa ada koordinasi dan berpegangan pada aturan dan standarisasi yang jelas. Hal ini tentu saja menimbulkan inefisiensi penggunaan anggaran, karena bisa saja menggunakan infrastruktur yang telah ada, dan tinggal melakukan migrasi sistem.



### 3. Prioritas pembangunan

Kondisi wilayah Kabupaten Buleleng yang beragam, mulai dari pesisir pantai, dataran, perbukitan, lembah, hingga pegunungan membuat akses ke pelosok-pelosok daerah menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Buleleng. Sedangkan pembangunan yang berbasiskan TIK belum menjadi prioritas, sehingga penganggaran dan kebijakan-kebijakan yang diambil belum mengarah ke sana.

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng (RPJMD) tahun 2012 s/d 2017, adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Damai Dan Lestari Berlandaskan Tri Hita Karana”**. Visi ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Demikian juga Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng mempunyai kewajiban untuk mewujudkannya melalui perumusan Visi yang searah dan selaras dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, maka disusunlah Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan sebagaimana di uraikan dalam RPJMD Kab. Buleleng 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas.
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas yang profesional, berbudaya dan bermoral.
4. Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan pembangunan.
5. Pelestarian budaya Bali yang ditumbuhkembangkan pada masyarakat.
6. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.
7. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (sustainable development).

Mencermati misi dimaksud di atas, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, sesuai tupoksinya, bertanggungjawab dalam



mewujudkan misi ke-4, yaitu: “Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan pembangunan”.

Sasaran yang ingin dicapai dari misi ini adalah:

1. Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan
2. Tumbuhnya rasa memiliki di kalangan pemangku kepentingan
3. Meningkatnya peran pemangku kepentingan dalam pengendalian pembangunan

Strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Kominfo adalah: *Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan, dengan arah kebijakannya yaitu: Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan.* Yang menjadi indikator ketercapaian bagian ini adalah: *Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan.* Program pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo untuk mencapai misi tersebut adalah “Program Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa.”

Dari program tersebut, maka yang menjadi indikator pencapaian programnya adalah: Meningkatnya kinerja layanan informasi pembangunan sampai keseluruhan desa berbasis IT, dengan 6 kegiatan pokok yaitu:

1. Jaringan online Pemkab Buleleng berfungsi baik  
Target capaian tahun 2013 sebanyak 40 titik dan target capaian pada akhir RPJMD adalah 189 titik.
2. Terbangunnya sistem informasi manajemen daerah yang efektif dan efisien  
Target capaian tahun 2013 sebanyak 1 sistem dan target capaian pada akhir RPJMD adalah 2 sistem
3. Berfungsinya sub domain website Pemkab Buleleng  
Target capaian tahun 2013 sebanyak 39 instansi dan target capaian pada akhir RPJMD adalah 39 instansi.

### **3.3. Analisis SWOT**

Lingkungan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri atas 2 faktor strategis yaitu faktor kekuatan yang dimiliki dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; serta faktor kelemahan yang apabila tidak diatasi dapat menjadi kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Sedangkan lingkungan eksternal juga terdiri dari 2 faktor strategis yaitu peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Hasil analisis terhadap faktor-faktor strategis tersebut dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) akan menghasilkan faktor-faktor kunci dalam menentukan upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Disamping itu akan dapat pula dirumuskan isu-isu mendesak yang terdapat di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan.

### 3.3.1. Kondisi Internal

#### 1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
- b. Peraturan Bupati No. 75 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.
- c. Telah memiliki jaringan online system yang menghubungkan 115 titik.
- d. Telah memiliki situs resmi Pemkab Buleleng, yaitu: [www.bulelengkab.go.id](http://www.bulelengkab.go.id)
- e. Telah memiliki ruang server yang cukup baik
- f. Telah memiliki server untuk aplikasi LPSE
- g. Telah memiliki lab pelatihan komputer sendiri dengan jumlah komputer praktikan sebanyak 15 unit.
- h. Telah memiliki media center sebagai sarana pelayanan internet gratis bagi masyarakat dengan jumlah komputer yang disediakan sebanyak 13 unit
- i. Memiliki radio komunikasi (HT) dengan frekuensi khusus Pemkab. Buleleng
- j. Memiliki peralatan pengamanan persandian.

#### 2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Terbatasnya jumlah sumberdaya aparatur yang memiliki pendidikan dan keahlian di bidang TIK, dan persandian
- b. Keterbatasan jumlah anggaran yang dimiliki
- c. Gedung kantor yang lokasinya berada di belakang dan menyulitkan akses langsung dari masyarakat, sehingga media center ditempatkan di Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah Kabupaten Buleleng
- d. Kapasitas ruang yang masih kurang.



### 3.3.2. Kondisi Eksternal

#### 1. Peluang (*Oppurtunities*)

- a. Jumlah penduduk kabupaten Buleleng yang besar
- b. Menjadi target pasar untuk perangkat-perangkat TIK
- c. Banyaknya media informasi yang hadir, baik cetak maupun elektronik
- d. Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan TIK
- e. Perhatian pemerintah pusat pada perkembangan TIK di Kabupaten Buleleng cukup baik
- f. Tingginya minat masyarakat untuk menyaksikan kesenian tradisional
- g. Telah terbentuknya beberapa kelompok informasi masyarakat di beberapa kecamatan yang aktif bergerak dan mampu untuk mengembangkan potensi anggotanya.

#### 2. Tantangan (*Treaths*)

- a. Kondisi geografis Kabupaten Buleleng yang memiliki bentuk pesisir dan perbukitan yang menyulitkan dalam pembangunan jaringan komunikasi dan informasi.
- b. Beberapa daerah, terutama di pedesaan masih kesulitan dalam mendapatkan akses internet atau jaringan seluler.
- c. Belum adanya komitmen yang kuat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan Master Plan pembangunan e-gov yang telah disusun oleh Bappeda Litbang, sehingga pelaksanaannya belum terkoordinasi dengan baik.
- d. Arah pembangunan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mengarah pada pembangunan di bidang TIK.

### 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi tantangan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng ke depan menitikberatkan pada peran teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pendekatan ilmiah dan logis (teknokratis) maka dapat disampaikan beberapa isu strategis, sebagai berikut:

#### 1. Rendahnya penyebaran informasi publik ke masyarakat

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai Badan Publik memiliki kewajiban untuk



memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Hal ini mengacu pada pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.

Selain daripada 5 point jenis informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan kepada publik/ masyarakat, sesuai dengan Undang-undang keterbukaan informasi publik tersebut, maka tidak ada alasan apapun bagi badan publik untuk menolak memberikan informasi bagi masyarakat sebagai pengguna informasi publik.

Berbagai jenis media komunikasi yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, antara lain media elektronik (radio dan televisi), media cetak (majalah, koran, tabloid, dll.), media modern (website, blog, sosial media, dll.), media luar ruang (baliho, spanduk, leaflet, pamflet, dll), media tradisional (bondres, wayang kulit, arje, dll.) dan media interpersonal (ceramah, dialog, sosialisasi, dll.). Selain melalui media-media tersebut, pemerintah daerah juga dapat menyebarluaskan informasi melalui kelompok-kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibentuk oleh masyarakat untuk dapat memanfaatkan informasi bagi pengembangan kelompoknya dan kesejahteraan anggotanya.

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat ini harus benar-benar dikelola dengan baik, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi semaksimal dapat dipenuhi dengan baik. Jika pemerintah daerah mengabaikan hal tersebut maka akan memunculkan berbagai persoalan, antara lain:

- a. Tidak terpublikasikannya pembangunan daerah yang telah dilakukan, sehingga sebaik apapun yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah tidak diketahui oleh masyarakat.
- b. Kurang harmonisnya hubungan pemerintah daerah dan masyarakat karena komunikasi yang kurang lancar, sehingga dapat menimbulkan gejolak-gejolak yang bisa mengganggu stabilitas daerah.
- c. Munculnya gugatan informasi dari masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, kepada pemerintah daerah yang dapat menimbulkan dampak hukum yang dapat mengganggu stabilitas kinerja pemerintah daerah.

## **2. Rendahnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng**

Pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*) bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance* dan *clean governance*). E-government sendiri merupakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah yang terkoordinasi satu sama lain secara optimal dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Agar penerapan e-government ini dapat terlaksana dengan baik, maka perlu diperhatikan faktor teknis dan non teknis yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Faktor teknis yang dimaksud ini antara lain: teknologi yang digunakan, sistem informasi yang diterapkan, peralatan/perangkat dipakai, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Sedangkan faktor non teknis yang dimaksud disini seperti: regulasi, SOP, pendanaan, dan yang paling penting adalah komitmen.

Komitmen ini menjadi hal mendasar yang harus dimiliki dan disamakan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di level pimpinan, pelaksana, pihak ketiga, maupun masyarakat. sebab tanpa adanya komitmen bersama, maka sebaik apapun faktor teknis yang disiapkan/ digunakan, tidak akan berjalan dengan baik. Hal inilah yang telah, sedang dan akan terus ditumbuhkembangkan sehingga harapannya seluruh instansi pemerintah (SKPD) dapat menerapkan *e-government* ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal dan sasaran utama penerapan *e-government* ini, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, dapat terwujud dengan baik.

## **3. Rendahnya penerapan pengamanan komunikasi dan informasi Pemkab Buleleng**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ibarat pisau bermata dua. Disatu sisi dapat memberikan keuntungan yang tak terbatas, dimana komunikasi informasi dapat berjalan dengan sangat luas dan sangat cepat, atau dikenal dengan istilah komunikasi tanpa batas ruang dan waktu (*borderless*), sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dapat diperoleh dengan mudah. Kemudahan memperoleh informasi ini tentu saja dapat meningkatkan perekonomian (munculnya perdagangan elektronik/ e-commerce), menurunkan jumlah pengangguran (mudahnya mendapat informasi lowongan pekerjaan di berbagai tempat), meningkatkan pengetahuan/pendidikan, dan lain sebagainya.

Namun disisi lainnya, kemajuan TIK dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, pemerintah dan pihak lainnya, seperti misalnya: meningkatnya kejahatan di dunia maya, maraknya konten-konten negatif yang bersifat provokatif maupun pornografi, munculnya berita/informasi yang salah (*hoax*) yang menimbulkan ‘kegaduhan’ di dunia maya, rentannya keamanan data/informasi baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta/masyarakat, dan penyalahgunaan TIK untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem ataupun mekanisme pengamanan komunikasi dan informasi, baik itu terhadap orang-orang yang sangat penting (*vvip*), tempat/bangunan penting, kegiatan/event penting, dan data-data penting milik pemerintah daerah. Sehingga dapat ikut menjaga stabilitas di wilayah Pemerintah Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.



## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi**

Sejalan dengan arah pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mendukung sepenuhnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang tercantum dalam RPJMD 2012-2017.

##### **4.1.1. Visi**

Visi Kabupaten Buleleng adalah **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Damai Dan Lestari Berlandaskan Tri Hita Karana”**.

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan

##### **4.1.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Buleleng tersebut, maka disusunlah 7 buah misi pembangunan Kabupaten Buleleng kurun waktu 2012-2017. Dari ketujuh misi tersebut, maka Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng berkontribusi pada misi keempat, yaitu: **“Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan pembangunan”**

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

##### **4.2.1. Tujuan**

Tujuan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan pengamanan komunikasi dan informasi milik Pemkab Buleleng.

#### **4.2.2. Sasaran**

Sasaran strategi ini menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan/diwujudkan melalui serangkaian kegiatan yang mengacu pada tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng. Sasaran strategis yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya penyebaran informasi publik ke masyarakat.
2. Meningkatnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng.
3. Meningkatnya penerapan pengamanan komunikasi dan informasi Pemkab Buleleng.

Untuk lebih jelasnya tentang Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran, dan target sasaran selama 5 (lima) tahun ke depan, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Buleleng**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan pelayanan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika	Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat	Persentase SKPD yang mendapatkan gugatan informasi dari masyarakat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Meningkatnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng	Persentase SKPD yang menerapkan e-Government sesuai standar	72,97%	91,89%	92,31%	97,44%	100,00%
2.	Meningkatkan pengamanan komunikasi dan informasi milik Pemkab Buleleng	Meningkatnya penerapan pengamanan komunikasi dan informasi Pemkab Buleleng	Persentase keamanan komunikasi dan informasi di Pemkab Buleleng	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



### **4.3. Strategi dan Kebijakan**

#### **4.3.1. Strategi**

Strategi pembangunan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pembangunan bidang komunikasi dan informatika serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu (5 tahun). Strategi pembangunan yang dikembangkan untuk tercapainya perwujudan tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengelolaan data opini dan tema publik
2. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat
3. Peliputan dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah
4. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media komunikasi
5. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya komunikasi
6. Pengembangan dan pemberdayaan jaringan online Pemkab. Buleleng
7. Penyusunan kajian terkait pengembangan TIK
8. Peningkatan kapasitas SDM di bidang TIK
9. Pengembangan Aplikasi
10. Pengembangan Ekosistem e-Government
11. Pengembangan Tata Kelola e-Government
12. Pelaksanaan operasional dan pengamanan Persandian
13. Pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi pengamanan persandian
14. Pengembangan tata kelola persandian.

#### **4.3.2. Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, yaitu tindakan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan yang berfungsi mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data opini publik yang muncul pada media cetak, elektronik dan online (sosial media)
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data tema komunikasi publik yang sedang berkembang di masyarakat

3. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui siaran keliling dan pelayanan multimedia
4. Melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan pembangunan daerah
5. Menyebarluaskan informasi melalui Pameran Pembangunan
6. Menyebarluaskan informasi melalui penerbitan majalah
7. Menyebarluaskan informasi melalui media tradisional
8. Menyebarluaskan informasi melalui media elektronik (radio dan televisi)
9. Mengembangkan dan memberdayakan kelompok informasi masyarakat
10. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi
11. Mengembangkan dan memelihara jaringan online Pemkab Buleleng
12. Mengelola server dan kelengkapannya
13. Penyediaan layanan internet bagi instansi pemerintah dan masyarakat
14. Pengumpulan dan pengolahan data
15. Menyusun kajian-kajian dalam rangka pengembangan TIK di Pemkab. Buleleng
16. Melakukan pengembangan dan pengelolaan fasilitas pengembangan SDM bidang TIK
17. Melakukan pelatihan SDM di bidang TIK
18. Mengelola dan mengembangkan layanan pengadaan secara elektronik
19. Membangun, mengembangkan dan memonitor aplikasi layanan Pemkab Buleleng
20. Pengembangan dan pengelolaan nama domain dan subdomain
21. Pengembangan dan pengelolaan situs resmi Pemkab Buleleng
22. Penyusunan regulasi dan pengembangan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penerapan e-government
23. Peningkatan kapasitas tenaga teknis Dinas Kominfosandi terkait penerapan e-government
24. Melaksanakan pengamanan persandian terhadap orang (vvip), tempat strategis, dan kegiatan strategis yang dilaksanakan/terkait dengan Pemkab Buleleng
25. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan persandian yang dilakukan
26. Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan pengaman persandian yang dimiliki

27. Menyusun regulasi/ kebijakan terkait pengamanan komunikasi dan informasi di lingkup Pemkab Buleleng
28. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang persandian

Dalam menjabarkan strategi dimaksud telah dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pada dasarnya merupakan batasan-batasan yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan strategi. Adapun arah kebijakan yang akan diimplementasikan dalam lima tahun kedepan adalah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2012–2017 adalah seperti tercantum pada Tabel 4.2 di bawah ini.



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
2. Meningkatkan pengamanan komunikasi dan informasi milik Pemkab Buleleng	1. Terjaminnya keamanan komunikasi dan informasi pada kegiatan dan fasilitas penting	1. Pelaksanaan operasional dan pengamanan Persandian 2. Pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi pengamanan persandian 3. Pengembangan tata kelola persandian	1. Melaksanakan pengamanan persandian terhadap orang (vip), tempat strategis, dan kegiatan strategis yang dilaksanakan/terkait dengan Pemkab Buleleng 1. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan persandian yang dilakukan 2. Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan pengamanan persandian yang dimiliki 1. Menyusun regulasi/ kebijakan terkait pengamanan komunikasi dan informasi di lingkup Pemkab Buleleng 2. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang persandian

**Tabel 4.2**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Damai Dan Lestari Berlandaskan Tri Hita Karana  
Misi : Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pelayanan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika	2 1. Meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat	3 1. Pengumpulan dan pengelolaan data opini dan tema publik 2. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat 3. Peliputan dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah 4. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media komunikasi	4 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data opini publik yang muncul pada media cetak, elektronik dan online (sosial media) 2. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data tema komunikasi publik yang sedang berkembang di masyarakat 1. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui siaran keiling dan pelayanan multimedia 1. Melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan pembangunan daerah 1. Menyebarluaskan informasi melalui Pameran Pembangunan 2. Menyebarluaskan informasi melalui penerbitan majalah 3. Menyebarluaskan informasi melalui media tradisional 4. Menyebarluaskan informasi melalui media elektronik (radio dan televisi) 1. Mengembangkan dan memberdayakan kelompok informasi masyarakat 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi 1. Mengembangkan dan memelihara jaringan online Pemkab Buleleng 2. Mengelola server dan kelengkapannya 3. Penyediaan layanan internet bagi instansi pemerintah dan masyarakat 1. Pengumpulan dan pengolahan data 2. Menyusun kajian-kajian dalam rangka pengembangan TIK di Pemkab. Buleleng 1. Melakukan pengembangan dan pengelolaan fasilitas pengembangan SDM bidang TIK 2. Melakukan pelatihan SDM di bidang TIK 1. Mengelola dan mengembangkan layanan pengadaan secara elektronik 2. Membangun, mengembangkan dan memonitor aplikasi layanan Pemkab Buleleng 1. Pengembangan dan pengelolaan nama domain dan subdomain 2. Pengembangan dan pengelolaan situs resmi Pemkab Buleleng 1. Penyusunan regulasi dan pengembangan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penerapan e-government 2. Peningkatan kapasitas tenaga teknis Dinas Kominfo sandi terkait penerapan e-government
	2. Meningkatkan penerapan e-government di Pemkab Buleleng	5. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya komunikasi 1. Pengembangan dan pemberdayaan jaringan online Pemkab. Buleleng 2. Penyusunan kajian terkait pengembangan TIK 3. Peningkatan kapasitas SDM di bidang TIK 4. Pengembangan Aplikasi 5. Pengembangan Ekosistem e-Government 6. Pengembangan Tata Kelola e-Government	

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **5.1. Pengantar**

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain, Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan SKPD. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Selanjutnya dalam penjabaran kegiatan harus memiliki tolak ukur yang jelas yang dirumuskan dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *proses*, *output*, *outcome* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng dalam usaha mewujudkan visi dan misi Pemerintah daerah, telah menyusun berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Secara garis besar, terdapat 7 (tujuh) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang akan dilakukan, yaitu:

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
  - b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
  - c. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan piranti lunak
  - d. Penyediaan Layanan Akses Internet
2. Program Pengkajian dan Penelitian bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengkajian dan Penelitian bidang informasi dan komunikasi
  - b. Pengumpulan dan Pengolahan Data
  - c. Pengembangan dan Pengelolaan Data Center



3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
  - b. Pengelolaan Fasilitas Pengembangan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
4. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
  - b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
  - c. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
  - d. Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah melalui peliputan dan dokumentasi
  - e. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok komunikasi sosial masyarakat
  - f. Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa
  - g. Pemberdayaan dan Penyediaan akses Informasi Media dan Lembaga Komunikasi Publik
5. Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Opini Publik
  - b. Pengumpulan dan Pengolahan Data Tema Komunikasi Publik Lintas Sektoral
  - c. Pelayanan Informasi Publik
6. Program Pengelolaan Layanan e-Government, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan Layanan Secara Elektronik
  - b. Pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik
  - c. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain
  - d. Pembinaan dan pengembangan situs resmi pemerintah daerah
  - e. Pengkajian dan Pengembangan Implementasi e-Government
  - f. Peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan Sumber Daya Persandian
  - b. Pembinaan dan Pengembangan SDM bidang persandian
  - c. Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Komunikasi Sandi
  - d. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

## **5.2. Rencana Program dan Kegiatan SKPD**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, untuk kurun waktu 2013 sampai dengan 2017, dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**  
**Kabupaten Buleleng**

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis			Sasaran/capaian Program		Target					Program		Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket		
Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	25
1. Meningkatkan pelayanan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika	Persentase desa/kelurahan di kabupaten Buleleng yang mampu mengakses internet dengan baik	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.1 Meningkatkan penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat	Persentase SKPD yang mendapatkan gugatan informasi dari masyarakat	0,00%	Tersebarluasnya isu dan tema di masyarakat dengan baik	Persentase konflik di masyarakat akibat isu dan tema yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Persentase konflik di masyarakat akibat isu dan tema yang dapat diselesaikan	Pengumpulan dan pengolahan data opini publik	Jumlah laporan hasil monitoring opini publik di media cetak dan sosial media	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	65.000.000		
													Waktu pelaksanaan kritik saran di situs resmi Pemkab Buleleng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan			
												Pengumpulan dan Pengolahan Data Tema Komunikasi Publik Unitas Sekeloa	Jumlah pelaksanaan dialog dan sosialisasi terkait tema publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 kali	75.000.000		
													Waktu pelaksanaan monitoring tema publik baik lokal maupun nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan			
												Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi melalui saran kelling yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 kali	200.000.000		
													Jumlah kegiatan pelayanan multi media yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 kali			
													Waktu pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat melalui hotline sms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan			
													Jumlah edisi penerbitan majalah Singa Manggala	3 edisi	168.865.000	6 edisi	490.390.000	6 edisi	465.475.000	4 edisi	273.805.000	6 edisi	180.000.000			
													Persentase gugatan informasi publik antara masyarakat dan pemerintah yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
													Persentase informasi publik antara masyarakat dan pemerintah yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		





[illegible]

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis			Sasaran/capaian Program		Target					Program		Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017	Uraian	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017								
1.		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Terintegrasi aplikasi pemerintah daerah dalam satu portal aplikasi layanan pemerintah daerah	Persentase aplikasi milik pemerintah daerah yang terintegrasi dengan baik	0%	0%	0%	0%	5%	Program Pengelolaan Layanan e-Government	Persentase aplikasi milik pemerintah daerah yang terintegrasi dengan baik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Waktu pengelolaan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	310.384.000	
												Pembinaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi	Jumlah aplikasi pemerintah yang diimplementasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 aplikasi	85.000.000	
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah aplikasi pemerintah yang dimonitor penerapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	30 aplikasi		
												Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	Waktu monitoring nama domain dan subdomain yang ada di lingkup Pemkab Buleleng	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	49.000.000	
													Jumlah proses pendaftaran nama domain dan sub domain yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	10 kali		
												Pembinaan dan Pengembangan Situs resmi Pemerintah Daerah	Jumlah sub domain pada situs resmi Pemkab Buleleng yang dikelola dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	49 sub domain	106.200.000	
												Pengembangan dan Implementasi e-Government	Jumlah regulasi terkait implementasi e-government yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 regulasi	102.200.000	
												Jumlah dokumen kerjasama dalam bidang e-government yang diberikan	Jumlah tenaga teknis bidang TIK yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	4 orang	52.000.000	
2.	Meningkatkan pengamanan komunikasi dan informasi milik Pemkab Buleleng	100,00%																						

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis				Sasaran/capaian Program		Target					Program		Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017	Uraian	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017									
2.2.1 Meningkatkan penerapan pengamanan data dan informasi di Pemkab Buleleng	Persentase keamanan komunikasi dan informasi di Pemkab Buleleng	100,00%	3	Terjaminnya keamanan komunikasi dan informasi pada kegiatan dan fasilitas penting milik Pemkab Buleleng	Persentase terlaksananya pengamanan data dan informasi pada kegiatan dan fasilitas penting milik Pemkab Buleleng	6	7	8	9	10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						100%	100%	100%	100%	100%	Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Komunikasi Sendi	Jumlah pengamanan persandian yang dilakukan dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 kali	245.425.000	
											Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan persandian yang dihasilkan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	97.000.000	
											Pengelolaan Sumber Daya Persandian	Jumlah dokumen kebijakan terkait pengamanan data dan informasi lingkup Pemkab Buleleng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	185.500.000	
											Jumlah peralatan persandian yang dirawat dan siap pakai	Jumlah kegiatan sosialisasi keamanan data dan informasi lingkup Pemkab Buleleng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 unit		
											Pembinaan dan Pengembangan SDM bidang persandian	Jumlah kegiatan sosialisasi keamanan data dan informasi lingkup Pemkab Buleleng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kali	88.811.800	
											Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan lintas persandian	Jumlah kegiatan sosialisasi keamanan data dan informasi lingkup Pemkab Buleleng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 orang		



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

#### **6.1. Pengantar**

Dalam penetapan indikator kinerja pada Renstranya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian senantiasa mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD tahun 2012-2017. Hal ini harus dilakukan agar terjadi sinergisitas antara program kerja yang direncanakan di dinas dengan Tujuan dan Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RPJMD, sehingga setiap SKPD akan mampu memberikan kontribusinya didalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Namun tidak semua indikator kinerja SKPD yang telah disusun tersebut mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, hanya sebagian saja, dan yang tidak tetap mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.

#### **6.2. Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Dalam tabel 6.1 berikut akan ditunjukkan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017.

Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng  
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Targget Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah jaringan komunikasi berfungsi dengan baik/handal	35 titik	40 titik	75 titik	105 titik	145 titik	189 titik	189 titik
2	Jumlah SDM terlatih bidang komunikasi dan informasi	113 org	256 org.	331 org.	351 org.	366 org.	391 org.	1.695 org.
3	Tersedianya hot spot pada ruang terbuka public	2 titik	1 titik	2 titik	2 titik	2 titik	2 titik	2 titik
4	Jumlah SKPD dengan pengelola Sub Domain website optimal	39 instansi	39 instansi	39 instansi	39 instansi	39 instansi	39 instansi	39 instansi
5	Tingkat penggunaan Software legal/OSS setiap SKPD	1 instansi	1 instansi	1 instansi	1 instansi	1 instansi	1 instansi	1 instansi
6	Kenaikan kapasitas bandwidth internet dari 6 menjadi 25 MBPs	Upto 6 MBPs	Upto 6 MBPs	Upto 25 MBPs	Upto 25 MBPs	Upto 25 MBPs	Upto 25 MBPs	Upto 25 MBPs

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

#### **7.1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2012–2017 yang disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui penerapan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bertujuan untuk meningkatkan penyebaran informasi publik ke masyarakat sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008;
3. Guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean governance*), maka perlu diterapkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*) secara menyeluruh dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
4. Keamanan komunikasi dan informasi menjadi bagian penting yang harus dijaga, diawasi dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya khususnya bagi orang-orang penting (*vvip*), tempat-tempat penting dan strategis, serta kegiatan-kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Pemkab Buleleng.

#### **7.2. Saran**

Saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi yang berkesinambungan antara Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam perencanaan yang mengacu pada dokumen Renstra. Seluruh program dan kegiatan yang akan disusun dalam Renja maupun RKA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada dalam Renstra sehingga dapat mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan;
2. Sangat diperlukan adanya dukungan dan Komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dan *stakeholders* lainnya untuk mendukung



pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng 2012-2017.

3. Sumber daya manusia menjadi komponen penting dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan yang dirancang dalam Renstra ini. Untuk itu sangat diperlukan adanya peningkatan jumlah SDM aparatur yang memiliki kemampuan di bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi;
4. Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait yang membutuhkan dan melaksanakan pembangunan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dimana Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai instansi yang bertanggungjawab melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Buleleng;